



INSPEKTORAT DAERAH
KOTA BOGOR

Pengawasan APIP Terhadap Pelaporan Pertanggungjawaban Dana BANSOS RTLH Pemerintah Kota Bogor



Widiatmoko,ST,MM,CRMP
Auditor

SNI ISO 37001 : 2016



Committed
Accurate and Trustworthy
PT. MUTU HIJAU INDONESIA

No. Sertifikat : 008/MHI-SMAP



Komite Akreditasi Nasional
LSMAP-005-IDN



 inspektorat.kotabogor.go.id

 [Inspektorat Daerah Kota Bogor](#)

 [inspektorat_kotabogor](#)

 [inspektoratBGR](#)

“Inspektorat Daerah Kota Bogor Menghapus Stigma dengan Merubah Paradigma”



PROFIL INSPEKTORAT DAERAH

Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 SMAP

PK APIP Level 3



2020 sd Skrg



2021 sd Skrg

SPIP Level 3



2020 sd Skrg

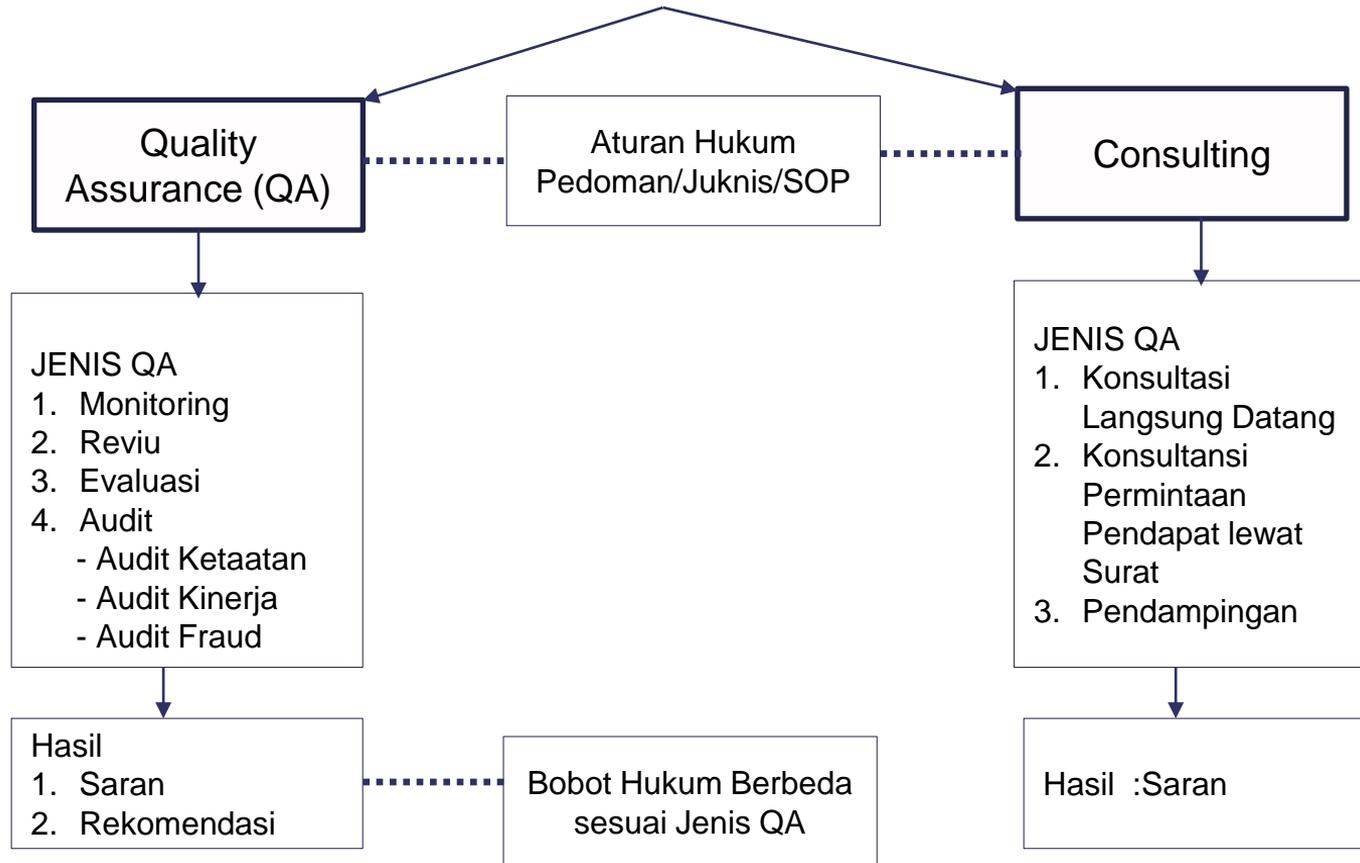
Inspektorat Daerah Kota Bogor

Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Auditor dalam melaksanakan tugas “ Quality Assurance dan Consulting”

- Dilarang menerima dan melakukan penyuapan serta akan dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. (Sanksi Sosial Pengawasan + Sanksi Kepegawaian)
- Apabila ada yang memberi hadiah berupa uang, barang, rabat (diskon), fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik pada saat penugasan maupun diluar penugasan dan tidak bisa menolaknya karena adat ketimuran, maka pemberian hadiah tersebut harus dilapor-kan ke unit pelayan gratifikasi (UPG) Pemerintah Kota Bogor. (Diverifikasi Tim UPG → Disumbangkan sosial, Dikembalikan ke Dinas Terkait, Diterima Pegawai

Tugas Pengawasan Inspektorat – Paradigma Baru



BANSOS RTLH -- DASAR HUKUM / LANDASAN

Dasar dalam proses pengajuan, pencairan, pelaksanaan, pelaporan

(Digunakan Inspektorat Daerah sebagai kriteria – pasal atau ketentuan yang dilanggar atau tidak dipenuhi)

1. Peraturan Walikota Bogor Nomor 101 Tahun 2022 – Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
 - Pasal 25 sd Pasal 46
2. Keputusan Walikota Bogor Nomor: 400.9/Kep.720-Disperumkim/2024 tentang Penetapan Pagu Maksimal Anggaran Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Bogor
 - Maksimal Rp.20jt;
 - Komposisi : Biaya upah max 15%,Biaya Admin, Bahan Bangunan
3. Petunjuk Teknis Bansos RTLH - BST –BSTT 2023 sebagai Penjabaran Perwali 101 Tahun 2022 – Ditetapkan oleh Kepala Disperumkim Maret 2023

Dalam Pengawasan – Inspektorat bisa menarik keatas linear Dasar Hukum / Landasan yang digunakan baik Peraturan Menteri Sosial, PUPR, PP, atau UU dalam melakukan pengawasan

Aturan Keuangan Daerah :
UU Perbendaharaan Negara
UU Tipikor
PP Keuangan Daerah

Aturan diatas terkait Pengawasan pelaporan

1. Perwali 101 Tahun 2022 **PERTANGGUNGJAWABAN**

Ps 43 ayat (1) Penerima Bansos BERTANGGUNG JAWAB secara Formal dan material atas penggunaan bansos yang diterima;

ayat 8 : Penerima bansos yang TIDAK MENYAMPAIKAN laporan penggunaan bansos DAPAT dikenakan SANKSI sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

ayat 9 : Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan banos.

Pengawasan Inspektorat yang untuk penentuan sanksi – AUDIT
Audit yang dilakukan –sesuai tingkat berat/ringan permasalahan

- Audit Ketaatan
- Audit Fraud - Kecurangan / Kasus

Aturan diatas terkait Pengawasan pelaporan

2. JUKNIS Bansos RTLH - BST –BSTT 2023 sebagai Penjabaran Perwali 101 Tahun 2022 – Ditetapkan oleh Kepala Disperumkim Maret 2023

BAB 3 –MEKANISME PELAKSANAAN

Angka 3.6 Mekanisme Pelaporan (hal 25)

1. Penerima Bansos bertanggungjawab penuh secara formal dan material atas penggunaan dana bansos yang diterimanya;
 2. Penyampaian pertanggungjawaban penggunaan bansos secara online (aplikasi sahabat)
- ..
- 8 . Penerima bansos yang TIDAK MENYAMPAIKAN laporan penggunaan bansos DAPAT dikenakan SANKSI sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

LAMPIRAN

Huruf (J) – Alur Pelaporan / LPJ RTLH BST

Terlampir dibawah alur sesuai Juknis

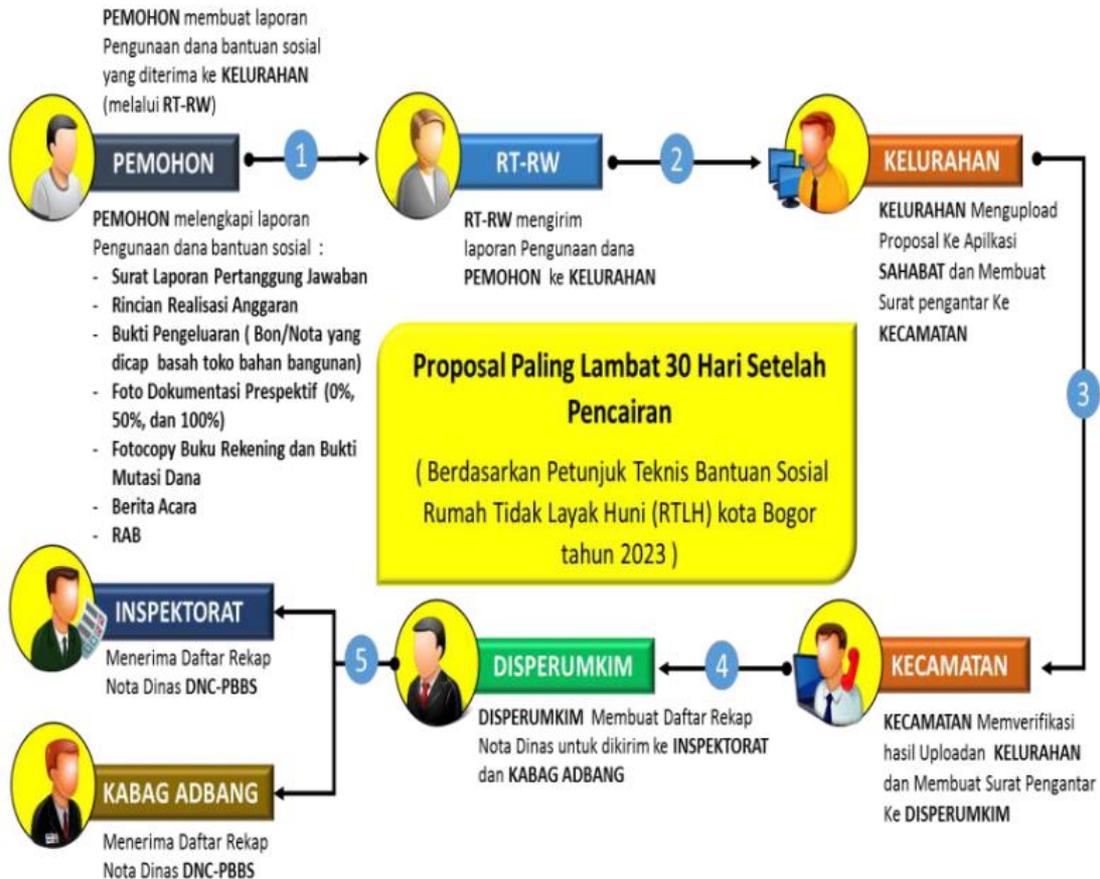
Note:

---- Alur ini menggambarkan Siapa Saja yang Berperan dalam LPJ

---- Bisa digunakan oleh Inspektorat - jika AUDIT untuk menentukan yang terlibat dalam permasalahan

ALUR BANSOS RTLH REGULER

PELAPORAN



SIAPA YANG TERLIBAT
JIKA ADA MASALAH ? --
AUDIT

KODE TEMUAN
- Kondisi Vs Rekomendasi

3. Keputusan Walikota Bogor Nomor: 400.9/Kep.720-Disperumkim/2024 tentang Penetapan Pagu Maksimal Anggaran Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Bogor

- Maksimal Rp.20jt;
- Komposisi : Biaya upah max 15%,Biaya Admin, Bahan Bangunan

Sebagai Dasar Menyusun RAB Dan Realisasi

Dalam penyusunan RAB setiap komponen berpedoman pada standar yang dimiliki oleh Kota Bogor sebagai batas tertinggi dalam RAB dan Realisasi

1. Kepwal 900/Kep 386-BKAD/2023 : Standar Harga Satuan Jasa Pemda Kota Bogor Tahun 2024 (harga tertinggi/maksimal upah tukang – hal 80)
2. Kepwal 900/Kep 318-BKAD/2023 : Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 027/Kep.33-BKAD/2023 tentang Standar Harga Satuan Barang Pemda Kota Bogor Tahun 2024 (harga tertinggi/maksimal material /bahan bangunan)

Survey Harga Pasar dan Real Cost

PELAPORAN BANSOS RTLH

2. Penyampaian pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial bantuan sosial secara online dilakukan melalui Aplikasi Sahabat dengan mengupload hasil scan dokumen pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan dibubuhi stempel serta ditandatangani oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) setempat;
 - b. Rincian realisasi anggaran;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan bantuan sosial dibubuhi materai dan ditandatangani penerima bantuan;
 - d. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (nota di stempel basah toko);
 - e. Fotocopy buku rekening bank dan fotocopy bukti mutasi dana;
 - f. Foto dokumentasi perspektif (0%, 50%, 100%) dengan kualitas gambar jelas dan tidak buram.

KODE TEMUAN

- Kondisi Vs Rekomendasi

BUKTI

1. LENGKAP
 - Sesuai ketentuan
 - Urut sesuai bukti yang dikeluarkan
2. SAH
 - Ada Bukti Otorisasi pihak yang mengeluarkan
 - Tidak palsu / dipalsukan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Bukti tidak lengkap dan sah melanggar :

1. PP 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 141 ayat 1 “ Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;
2. Permendagri 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Pada Penjelasan Romawi I. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja, Angka 1 Ketentuan Umum, angka (a) dinyatakan bahwa pelaksanaan belanja diatur sebagai berikut: (a) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

PELAPORAN BANSOS RTLH – Sesuai JUKNIS

(Laporan LPJ format gunakan Juknis untuk menghindari kesalahan prosedur dan adminitrasi)

B. Format Ceklis Kelengkapan Berkas Pelaporan LPJ BST

Lampiran hal 50 sd 59

DAFTAR CEKLIS KELENGKAPAN PERSYARATAN PROPOSAL PELAPORAN LPJ BANTUAN SOSIAL BST

Nama :
 NIK/KTP :
 Alamat :

NO	NAMA DOKUMEN	TERPENUHI		KET
		ADA	TIDAK	
1	Surat Permohonan (Maksud dan Tujuan Permohonan)			
2	Surat pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Sosial BST			
3	Rincian Penggunaan Dana Bantuan BST			
	Kuitansi Pembuat LPJ			
4	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-E)			
5	Fotokopi Kartu Keluarga			
6	Fotocopy Buku Rekening dan Bukti Mutasi Bank			
7	Absen harian dan kwitansi upah kerja			
8	Bukti-bukti Bon Belanja			
9	Foto Dokumentasi Progres 0%, 50%, 100%			
10	Catatan :			

Lampiran hal 51

Diperiksa Oleh,
 Ditandatangani

(NAMA)

REKAP LAPORAN PENGGUNAAN DANA RTLH BST

NAMA (penerima bantuan)
 NIK :
 ALAMAT :

1. Sumber Dana APBD

No	Kuantitas	Satuan	Uraian Bahan	Harga Satuan	Jumlah
Bahan Matrial					
1					
2					
Dst.					
Jumlah Bahan Matrial					Rp.
Upah Kerja (Maks. 15%)					
Tukang dan pembantu tukang					Rp.
Jumlah Upah Kerja					Rp.
Administrasi					
1	Biaya ATK				
2	Pembelian Matrai 10.000				
3	Print + Jilid, Fotocopy				
Jumlah Biaya Administrasi					Rp.
Total (A+B+C)					Rp.

2. Sumber Dana Swadaya

No	Uraian	Jumlah
1		
2		
dst.		
Total Swadaya		Rp.

Lampiran hal 53

Bogor,
 Penerima Bantuan Sosial,
 Ditandatangani

REAL
 COST

CONTOH HASIL PENGAWASAN APIP – BANSOS RTLH

1. **REVIU - LPJ Bansos**

Laporan Reviu Nomor: 700_525-Itda tanggal 22 Juli 2022 tentang LHR dan CHR atas SPJ Hibah Bansos Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada DISPERUMKIM Kota Bogor Tahun 2021

2. **MONITORING - LPJ Bansos**

Laporan Monitoring Nomor : 700/692-itda tanggal 2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang Laporan Hasil Monitoring Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2023

Terima Kasih



No. Sertifikat : 008/MHI-SMAP

